

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Yuhana. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan Di Indonesia Dan Masa Depan MPR. Bandung Fokus: Media, 2013.
- Adi Suryanto. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LAN, 2008. Alamsyah. *APBD Dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Rineka Jaya, 1997.
- Aminah, A. (2019). Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep. *Meraja Journal*, 2(2), 67–76.
- Aminudin. 2015. "Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". *e-Jurnal Katalogis*, 3(12).
- Andriana, N. "Pemilu Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif." *Penelitian Politik* 11 (2014).
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Aswandi, B. . K. R. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/2399>
- Ayu, Embun., Sari, R . Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi terhadap Kebijakan Publik serta Pengetahuan Dewan dalam Penyusunan APBD, Surakarta, U. M. (2014). Naskah publikasi.
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. 5, 8234–8245.
- Azifi, M. R., & others. (2022). Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Medan. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(5), 729–736
- Ardi, A. 2019. "Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda APBD Kota Sorong No.32 Tahun 2014". *Jurnal Supremasi Hukum*, 4(1): 528. <https://doi.org/10.33506/js.v4i1.528>.
- Budiyono. "Pelaksanaan, Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Fiat Justitia, Jurnal Ilmu Hukum* ." 7, No.1. (2013).
- Coryanata, I. (2011). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(2), 110–125.

- Djojosoekarto, Agung. *Bandingkan Dengan Kunarjo, Perencanaan Dan Pembiayaan Pembangunan, Jakarta: UI Press, 1996.*
- Efriza. *Studi Parlemen, Sejarah, Konsep, Dan Lanskap Politik Indonesia. Malang: Setara Press., 2014.*
- Erawan, Putra, Ketut, I dan Yasadhana, Victor. *Akuntabilitas Publik Dan Fungsi Pengawasan DPRD, Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftn KAS, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004.*
- Fauzi, H. Achmad. "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 11 (2014).
- Gafar, A., Zarkasi, A., & Hartati, H. (2024). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7187–7204.
- Gusman, Erry. 2024. "Pelaksanaan Fungsi Anggaran Oleh Legislatif di Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2): 69.
- Hakim, B. N. (2019). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 3(2), 97–109.
- Husen, La Ode. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. CV. Utomo.
- Husain, Fauziah. 2021. *Kinerja Pengawasan DPRD: Pengetahuan Anggaran, Budaya Kerja dan Transparansi Publik*. CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Ilham, I., Pasamai, S., & others. (2021). Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1425–1439.
- Indartini, Mirtanti (2016). *Peran & Fungsi DPRD Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Marpoyan Tujuh publishing.Solo
- Irving M. Copi. *Intreduction to Logic Dalam PM. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika , No.6 Tahun XI, 1994.*
- Lusiah., & Rajagukguk, J. "Pola Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Hal Tugas Dan Fungsi Anggaran." 19, No.3 (2011).
- Mardiosmo. *Manajemen Pengeluaran Daerah*. Jakarta: Yayasan Indonesia Forum, 2001
- Marjuki, M. L., & Kesatuan, P. N. (2013). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance* Budiyo Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

- Universitas Lampung. 7(1).
- Modjo. *Pemanfaatan APBD Untuk Kepentingan Daerah*. Jakarta : Gramedia, 2004.
- Mutiah, A. G. (2008). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Kota Makassar. Universitas Hasanuddin. Makma, Ulfatul, dkk, 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Pengawasan Keuangan Daerah. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Vol 2, 58–65.
- Nadirah, S. P., Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, mix method (mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo). CV. Azka Pustaka.
- Naki, A. (2021). Implementasi Fungsi Anggaran DPRD terhadap Kinerja APBD Provinsi Gorontalo. *Jurnal SIAP BPSDM Provinsi Gorontalo*, 2(1), 7–12.
- Niko, Agustinus sudi, (2019). Implementasi Fungsi Legislasi Dan Pengawasan Dprd (Studi Kasus Dprd Kabupaten Mamasa Periode 2014-2019)
- Pamungkas, S. (2011). *Pengawasan DPRD: Perspektif Teori dan Praktik*. PT. Rineka Cipta
- Prakoso, Djoko. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Sarkawi. “Pedoman, Bentuk Dan Teknik Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD.” *Hukum Jatiswara* (2017).
- Schermerhorn, John R. *Basic Organizational Behavior, USA : John Wiley and Sons Inc*, 2002.
- Siagian. *Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Jakarta, LAN, 2008.
- Sinaga, K. D., & Nugroho, S. 2023. "Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik". *Yustisia: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1): 59-67. <https://doi.org/10.33319/yume>
- Suparji, S. (2021). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1),
- Tegar Jati Wicaksono, Maria Madalina. “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Salatiga Terhadap APBD Kota Salatiga Pada Tahun Anggaran 2018 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” 2 No. 3 (2018).
- Widodo, Joko, *Good Governance, Akuntabilitas dan Kontrol Bfokrasi, Insan Cendekia*, Surabaya, 2001.
- Jurnal, Amalia, Luky S. “Politik Pengawasan DPRD Dalam Upaya Pemakzulan Kepala Daerah : Studi Kasus Walikota Surabaya. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*” V8, No.1 (2011).
- Jurnal, Aminudin. “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola

- Pemerintahan Yang Baik, e-Jurnal Katalogis” 3, No.12 (2015).
- Jurnal, ———. “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” *e-Jurnal Katalogis* 3 (2015).
- Jurnal, ———. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2013).
- Jurnal, ———. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance” 7, No.1. (2013).
- Jurnal, Fitriyah. “Posisi DPRD Dalam UU No. 32 Tahun 2004. POLITIKA” I, No.1 (2010).
- Jurnal, Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, Suwondo. “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Malang” Vol. 2, N (2014)
- Jurnal, Ghony Renaldy. “Pengaruh Fungsi Pengawasan Dewan {erwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penggunaan Anggaran {Endapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT* 3 No. 31. (2015).
- Jurnal, Juharni. “Model Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sinjai.” *Open Journal Systems Universitas Negeri Makasar*, 3 (2016).
- Jurnal, Kumorotomo. “Memperbaiki Mekanisme Kawal Dan Imbang (Checks And Balances) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik (JKAP)*” 11, NO.1 (2007).
- Pemerintah Kabupaten Trenggalek. *Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang APBD Tahun 2025* (dan peraturan terkait lainnya yang relevan).
- Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Trenggalek* (dokumen internal DPRD yang mengatur mekanisme pengawasan).
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.